

MENGURAI PELIKNYA MASALAH SAMPAH DI KOTA DENPASAR

Oleh : I Nyoman Winata, SE, MIKom

Setiap hari sampah yang dihasilkan masyarakat Kota Denpasar mencapai 900 ton. Hanya sekitar 200 ton yang dikelola melalui 23 Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse and Recycle (TPS3R). Sisanya masih dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Suwung. Kondisi TPA Suwung sejak beberapa tahun lalu telah mengalami kelebihan kapasitas (overload). Tumpukan sampah di TPA Suwung sudah mencapai ketinggian sekitar 30 meter. Pada saat musim kemarau panjang, kebakaran sering terjadi. Sedangkan di musim hujan, jalan akses masuk ke TPA Suwung terganggu cukup parah karena berlumpur.

Pemerintah pusat sudah beberapa kali mengeluarkan wacana tentang penutupan TPA Suwung. Terakhir, wacana dilempar oleh Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nur Rofiq yang memastikan TPA Suwung akan ditutup 2026 bersama dengan 306 TPA lainnya di seluruh Indonesia. Jika benar TPA Suwung ditutup, sementara pengelolaan sampah di kota Denpasar belum optimal, maka masalah sampah akan meledak. Dampaknya akan sangat merugikan kehidupan masyarakat. Yang paling ditakutkan terjadi adalah terganggunya kesehatan dan rusaknya citra pariwisata Kota Denpasar.

Sejak beberapa bulan di akhir 2024 hingga awal 2025, masalah sampah tersaji di depan mata warga. Sampah di beberapa depo pembuangan sampah sementara sampai meluber ke jalanan. Seperti yang terjadi di Jalan Pulau Kawe hingga sempat viral di media sosial. Hal ini salah satunya dipicu oleh masalah di TPA Suwung yang mengakibatkan sulitnya proses pembuangan sampah. Intensitas hujan tinggi merusak akses jalan. Antrean panjang truk pengangkut sampah untuk masuk ke TPA Suwung menjadi pemandangan umum. Bahkan truk sampah ada yang mengantre hingga 2 hari. Dampaknya, banyak sampah-sampah milik warga yang terlambat diangkut hingga beberapa hari dan menumpuk di pinggir-pinggir jalan, menghadirkan pemandangan yang kurang sedap.

Masalah Sampah hingga kini sulit terurai. Bukan hanya karena upaya pemerintah Kota Denpasar yang kurang optimal, melainkan akibat budaya penanganan sampah oleh masyarakat yang sangat kurang. Masyarakat Kota Denpasar selama ini terlalu dimanjakan soal sampah. Banyak yang masih berpikir bahwa dengan membayar iuran sampah, masalah sampah dianggap selesai. Selanjutnya masalah sampah sepenuhnya hanya menjadi petugas pungut dan pembuangan sampah. Padahal kalau mau jujur, iuran sampah yang dibayarkan masih sangat minim yakni di kisaran Rp25 ribu hingga Rp50 ribu per bulan.

Budaya memilah sampah juga masih jauh dari harapan. Meskipun Pemkot Denpasar telah mewajibkan pemilahan sejak 1 Oktober 2024, pada kenyataannya masih sangat sedikit warga yang disiplin melakukannya. Sampah organik dan anorganik bahkan residu tetap dijadikan satu. Banyak alasan keengganan warga memilah sampah. Salah satunya karena tukang angkut sampah yang justru menyatukan sampah yang sudah terpilah saat pengangkutan. Namun sesungguhnya semua karena disiplin memilah yang rendah akibat kurangnya kesadaran. Sebagian besar warga masih terjebak pada pemikiran bahwa urusan sampah adalah urusan pemerintah.

Selain mewajibkan memilah sampah, Pemkot Denpasar telah mengupayakan banyak hal. Salah satunya dengan membangun TPS3R. Hingga saat ini sudah terbangun 23 TPS3R dan akan terus ditambah. Beberapa waktu belakangan, Teba Vertikal atau Teba Modern juga sedang digalakkan. Ada target terbangun 1000 Teba Modern di seluruh Kota Denpasar. Dalam waktu dekat, penggunaan mesin pembakar sampah atau incinerator akan dipilih sebagai solusi. Walikota Denpasar IGN Jaya Negara mengatakan segera melakukan lelang untuk penggunaan incinerator di TPST Kertalangu Kesiman. Sementara Pemerintah Provinsi Bali juga akan menggunakan teknologi Waste to Energy dimana sampah akan dibakar untuk menghasilkan energi. Proyek ini telah disampaikan Penjabat (Pj.) Gubernur Bali SM Mahendra Jaya. Semoga saja semua langkah tersebut tidak hanya berhenti di tataran wacana.

Sesungguhnya akan jauh lebih bijak jika masalah sampah tidak sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Justru warga Kota Denpasar lah yang mestinya mengambil peran lebih banyak dengan jalan menyelesaikan masalah sampah di hulu. Ini berarti sampah diselesaikan di rumah tangga masing-masing. Ada beberapa peran serta yang dapat diambil warga untuk penanganan sampah.

Pertama, lakukan dengan disiplin budaya memilah sampah. Ini memang tidak mudah namun harus dan wajib dilakukan. Agar dapat benar-benar optimal peran lembaga adat mulai dari Banjar hingga Desa Adat dilibatkan salah satunya dengan membuat pararem. Dalam pararem tersebut yang penting dicantumkan mengenai reward and punishment kepada warga. Mereka yang belum melakukan pemilihan sampah dikenakan sanksi berupa denda, sementara yang disiplin bisa diberikan reward potongan iuran sampah.

Kedua, warga diberikan sosialisasi secara rutin tentang pengolahan sampah di rumah tangga. Warga diajarkan cara mengolah sampah menjadi kompos atau membuat ecoenzym. Termasuk di dalamnya adalah tentang keberadaan bank sampah untuk sampah yang masih memiliki nilai jual. Sosialisasi dilakukan secara terus menerus melalui Banjar atau lingkungan rumah tangga terdekat.

Ketiga, pembentukan komunitas-komunitas peduli sampah dari berbagai kalangan dan generasi. Hal ini terutama penting dilakukan di kalangan generasi muda. Mereka yang tergugah soal pentingnya pengelolaan sampah dari hulu bisa dijadikan duta penanganan sampah. Yang diperlukan tentunya adanya apresiasi kepada mereka dengan memberikan insentif tertentu.

Masih banyak langkah lain yang bisa dilakukan warga Kota Denpasar dalam soal penanganan sampah dari hulu. Yang terpenting adalah tumbuh kesadaran bahwa sampah adalah masalah bersama yang tidak akan mungkin dapat diatasi hanya oleh pemerintah. Sikap yang memandang bahwa masalah sampah hanya urusan pemerintah akan membuat masalah ini menjadi lingkaran setan. Tanpa peran serta penuh warga Kota Denpasar, masalah sampah selesai hanya akan menjadi mimpi. Jika masalah sampah sampai meledak, yakinlah semuanya akan terdampak. (*)

Penulis : Warga Denpasar